

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara yang menggunakan sistem demokrasi. Pada sistem demokrasi, rakyat memiliki peran penting di dalam urusan negara atau kekuasaan pemerintah berada di tangan rakyat. Hal ini sesuai dengan pendapat Abraham Lincoln yang mengatakan bahwa “demokrasi adalah suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”.

Dalam negara yang berkedaulatan rakyat atau demokrasi, setiap warga negara berhak untuk ikut serta atau berpartisipasi dalam setiap pengambilan keputusan politik, baik secara langsung maupun melalui perwakilan. Hal ini karena kepentingan warga negara menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintah negara yang demokrasi.

Salah satu indikator implementasi penyelenggaraan kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat (demokrasi), yaitu adanya partisipasi politik dalam bentuk keterlibatan rakyat pada pesta demokrasi (pemilu). Semakin tinggi partisipasi politik menunjukkan bahwa rakyat terlibat dalam kegiatan negara, sebaliknya semakin rendah partisipasi politik menunjukkan bahwa rakyat kurang berminat dalam kegiatan negara.

Sehubungan dengan hal tersebut, Huntington dan Nelson (1994: 25) menjelaskan bahwa:

Peranan partisipasi politik dalam masyarakat merupakan suatu fungsi dari prioritas-prioritas yang diberikan kepada variabel-variabel dan tujuan-tujuan dan dari strategi pembangunan secara keseluruhan. Keterlibatan politik adalah baik bagi masyarakat, hal itu membuat demokrasi lebih bermakna dan membuat pemerintah lebih tanggap, itu merupakan hal yang baik secara individu, karena akan membuat berkembang menjadi individu yang bermoral dan warga negara yang bertanggung jawab dalam masyarakat.

Keterlibatan politik itu dapat diwujudkan dalam bentuk kontrak sosial yang dibuat oleh rakyat melalui perwakilannya untuk mendelegasikan kekuasaannya kepada pemerintah yang dipilihnya. Pembuatan kontrak sosial tersebut pada tingkat nasional dilakukan melalui Pemilihan Umum (Pemilu) dan untuk tingkat lokal dilakukan melalui Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada). Pemilu di tingkat nasional merupakan sarana demokrasi untuk memilih presiden, wakil presiden, dan anggota DPR. Adapun pemilukada untuk memilih gubernur, wakil gubernur, bupati/walikota, wakil bupati/wakil walikota dan anggota DPRD.

Pemilihan umum merupakan salah satu indikator stabil dan dinamisnya demokratisasi suatu bangsa. Sebagai konsekuensi negara demokrasi, Indonesia telah menyelenggarakan sepuluh kali pemilu secara periodik, yaitu pada tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, dan 2009. Akan tetapi penyelenggaraan pemilu yang benar-benar dianggap memenuhi standar demokrasi global, yaitu pemilu tahun 1999. Hal ini karena pemilu tahun 1999 dilaksanakan di era Reformasi setelah proses demokratisasi pemilu-pemilu sebelumnya tidak mampu menghasilkan nilai-nilai demokrasi yang matang akibat sistem politik yang otoriter.

Partisipasi politik rakyat tidak lepas dari kondisi atau sistem politik yang sedang berproses. Sistem kepolitikan bangsa Indonesia hingga dewasa ini telah berkali-kali mengalami perubahan, mulai dari Orde Baru sampai pada Reformasi. Disadari bahwa reformasi sering dimaknai sebagai era yang lebih demokratis. Tingkat partisipasi politik di Indonesia pada Pemilu 1955 mencapai 91,4%, Pemilu 1971 mencapai 96,6%, Pemilu 1977 dan Pemilu 1982 mencapai 96,5%, Pemilu 1987 mencapai 96,4%, Pemilu 1992 mencapai 95,1%, Pemilu 1997 mencapai 93,6%, Pemilu 1999 mencapai 92,6%, Pemilu 2004 mencapai 84,1%, dan Pemilu 2009 mencapai 70,9% (www.kpu.com diakses pada tahun 2010).

Tahapan demokrasi bangsa Indonesia kembali diuji pada pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) langsung yang dilaksanakan sejak 2005, baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Sebagai proses dari transformasi politik, makna pemilukada selain merupakan bagian dari penataan struktur kekuasaan makro agar lebih menjamin berfungsinya mekanisme *check and balances* di antara lembaga-lembaga politik dari tingkat pusat sampai daerah, masyarakat mengharapkan pula agar pemilukada dapat menghasilkan kepala daerah yang akuntabel, berkualitas, *legitimate*, dan peka terhadap kepentingan masyarakat.

Dalam konteks pemilukada, negara memberikan kesempatan kepada masyarakat di daerah untuk menentukan sendiri segala bentuk kebijaksanaan yang menyangkut harkat dan martabat masyarakat di daerah. Masyarakat di daerah yang selama ini hanya sebagai penonton proses politik pemilihan yang

dipilih oleh DPRD, saat ini menjadi pelaku atau *voter* (pemilih) yang akan menentukan terpilihnya gubernur dan wakil gubernur, walikota dan wakil walikota serta bupati dan wakil bupati.

Sistem pemilukada langsung lebih menjanjikan dibandingkan sistem yang telah berlaku sebelumnya. Pemilukada langsung diyakini dapat memperluas partisipasi politik masyarakat di daerah sehingga mereka memiliki kesempatan untuk memilih secara bebas pemimpin daerahnya tanpa suatu tekanan, intimidasi, *floating mass* (massa mengambang), kekerasan politik, dan penekanan jalur birokrasi. Hal ini dapat dikatakan bahwa pemilukada merupakan momentum yang cukup tepat munculnya berbagai varian preferensi pemilih yang menjadi faktor dominan dalam melakukan tindakan atau perilaku politiknya.

Salah satu karakteristik yang menandai sistem politik demokrasi adalah adanya partisipasi politik yang berkualitas yaitu dengan pemberian suara secara cerdas oleh warga negara dalam pemilu maupun pemilukada. Gaffar (2006:8) menyatakan bahwa:

Dalam suatu negara demokrasi, pemilu dilaksanakan secara teratur. Setiap warga negara yang sudah dewasa mempunyai hak untuk memilih dan dipilih dan bebas menggunakan haknya tersebut sesuai dengan kehendak hati nuraninya. Dia bebas untuk menentukan partai atau calon mana yang akan didukungnya, tanpa ada rasa takut atau paksaan dari orang lain. Pemilih juga bebas mengikuti segala macam aktivitas pemilihan, termasuk di dalamnya kegiatan kampanye dan menyaksikan perhitungan suara.

Namun, dalam kondisi warga negara saat ini tidak dengan mudah untuk bisa mewujudkan partisipasi yang berkualitas cerdas tersebut, dikarenakan

keadaan pemilih atau warga negara Indonesia masih banyak yang belum paham akan hakikat hak dan kewajiban politik sebagai warga negara yang sesungguhnya. Kemudian hal tersebut diperparah dengan kondisi pengetahuan warga negara yang masih minim yang berimplikasi kepada sikap politik yang mudah dipengaruhi orang lain. Hal ini terutama terjadi di kalangan pemilih pemula.

Pemilih pemula yaitu mereka yang merupakan kelompok warga negara yang baru pertama kali mengikuti pemilihan, yang rentang usianya antara 17-21 tahun dan berstatus sebagai pelajar, mahasiswa, serta pekerja muda. Biasanya partisipasi pemilih pemula dalam pemilu maupun pilukada masih hanya sekedar memilih atau asal ikut tanpa diikuti dengan kepehaman, kesadaran, dan tidak lebih dari sekedar aksi ritual yang lebih mensyaratkan untuk digugurkan dan tanpa makna. Sehingga penggunaan hak politiknya terkesan tidak diiringi dengan pendidikan politik (*political education*) yang memadai yang dikhawatirkan akan memicu lahirnya eksploitasi politik dikalangan pemilih pemula ini.

Kekeliruan pandangan umum tentang politik di kalangan remaja yang tergolong sebagai pemilih pemula tampaknya dapat kita pahami, karena keaburan pandangan politik menjadi besar karena pengalaman-pengalaman di masa lalu dalam praktek kehidupan politik yang lebih menampilkan aspek negatif sehingga menumbuhkan citra yang negatif pula, seperti masih ada fenomena politik uang (*money politic*) atau politik praktis yang memaksakan kehendak untuk kepentingan sesaat bagi golongan politik tertentu. Selain itu,

politik selalu diidentikan sebagai urusan yang pelajar ataupun mahasiswa tidak perlu tahu, karena tugas utama mereka hanya belajar tanpa harus memikirkan nasib bangsa. Jika hal seperti ini terus berlanjut, dikhawatirkan akan memicu lahirnya eksploitasi politik di kalangan pemilih pemula yang implikasinya dikemudian hari menyebabkan tidak akan tercapainya negara yang sejahtera yang selalu memperhatikan aspirasi warga negaranya.

Hal tersebut sesuai dengan penelitian Rosmiati (2005) yang menunjukkan bahwa pengetahuan siswa terhadap pemilu umumnya melihat pemilu sebagai bagian dari demokrasi yang harus bersifat luber (langsung umum bebas rahasia) dan jujur adil, tetapi sebagian besar dari mereka tidak mengetahui secara jelas mengenai peraturan dan mekanisme Pemilu 2004 dibandingkan pemilu sebelumnya. Pengetahuan sebagian besar yang terbatas berkaitan dengan sumber informasi terbesar yang mereka miliki, yaitu sekolah. Informasi ini dianggap tidak cukup, karena siswa menganggap bahwa pemilu dan politik pada umumnya hanya dibahas secara normatif dari pada menganalisis kenyataan dan peristiwa politik yang terjadi di sekitar mereka, sehingga mengakibatkan pemahaman pemilu sebagai hakekat dari pembelajaran politik tidak diperoleh siswa. Sebagian besar informasi pemilu diperoleh dari media massa yang memberikan informasi pemilu, tidak hanya berkaitan secara normatif dan teknis, tetapi memberikan gambaran proses politik yang terkait dengan Pemilu 2004, sehingga kaitan normatif dengan konteks sosial politik yang aktual memberikan pengaruh yang positif terhadap penerapan pengetahuan dan pemahaman siswa terhadap isu Pemilu 2004.

Pada Tanggal 10 Januari 2011 yang lalu masyarakat Kabupaten Cianjur telah melaksanakan pemilukada untuk memilih bupati dan wakil bupati periode 2011-2016. Terdapat enam pasang calon bupati dan wakil bupati, yang terdiri dari lima pasangan diusung partai politik dan satu pasangan dari jalur perseorangan (*independen*). Keenam pasang calon tersebut menurut data dari KPU Kabupaten Cianjur (2011), yaitu sebagai berikut:

1. Pasangan Hidayat Atori - U Suherlan (Hidayah) secara perseorangan atau *independen*;
2. Pasangan Dadang Sufianto - RK Dadan (Dangdan) yang diusung koalisi PKS, Hanura, Gerindra, dan PKPB;
3. Pasangan Hidayat Makbul - Sumitra (Hamam) yang diusung PDIP beserta 12 parpol non parlementer;
4. Pasangan Ade Barkah - Kusnadi Sundjaja (Abadi) yang diusung Partai Golkar;
5. Pasangan Tjetjep Muchtar Soleh - Suranto (Cerdas) yang diusung koalisi Partai Demokrat, PBB, PAN, serta PPRN; dan
6. Pasangan Maksana Sumitra - Ade Sanoesi (Maksad) yang diusung koalisi PPP dan PKB.

Dalam Pemilukada Kabupaten Cianjur 2011 ini, terdapat 2.228.146 daftar pemilih tetap (DPT) yang dapat menggunakan hak pilihnya di 3.740 tempat pemungutan suara (TPS) yang tersebar di 33 Kecamatan dan 348 desa. Dari jumlah 2.228.146 DPT, terdapat 724.827 orang pemilih pemula atau

pemilih yang baru pertama kali menggunakan hak pilihnya (KPU Kabupaten Cianjur, 2011).

Hasil penghitungan suara KPU Kabupaten Cianjur dalam rapat pleno pemungutan suara, memutuskan bahwa suara terbanyak diperoleh pasangan Tjetjep Muchtar Soleh - Suranto (Cerdas) dengan memperoleh suara 40,58% dari total suara. Urutan kedua diperoleh pasangan Dadang Sufianto - RK Dadan (Dangdan) dengan raihan suara 26% dan ketiga diperoleh pasangan Ade Barkah - Kusnadi Sundjaja (Abadi) dengan raihan suara 18%. Namun pemilukada ini harus diulang karena pasangan nomor urut 1 yaitu pasangan Hidayat Atori - U Suherlan (Hidayah), pasangan no urut 2 yaitu pasangan Dadang Sufianto - RK Dadan (Dangdan), dan pasangan no urut 6 yaitu pasangan Maksana Sumitra - Ade Sanoesi (Maksad) menggugat hasil penghitungan suara KPU Cianjur ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam gugatannya mereka meminta dilakukan pemilihan ulang dengan alasan banyaknya terjadi kecurangan terutama dalam masalah jumlah daftar pemilih tetap. Akhirnya MK mengabulkan pemilihan ulang di empat kecamatan, yaitu Kecamatan Cianjur, Kecamatan Cipanas, Kecamatan Pacet, dan Kecamatan Mande.

Pemungutan suara ulang pun akhirnya dilaksanakan secara serentak di 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Cianjur, Kecamatan Cipanas, Kecamatan Pacet, dan Kecamatan Mande pada tanggal 21 Maret 2011 yang lalu. Berdasarkan hasil perhitungan suara KPU Kabupaten Cianjur, diperoleh pasangan Tjetjep Muchtar Soleh - Suranto (Cerdas) masih menguasai perolehan suara dalam pemilihan ulang. Dari empat kecamatan yang melaksanakan pemilihan ulang, pasangan

Tjetjep Muchtar Soleh - Suranto menguasai di dua kecamatan, yaitu Kecamatan Cianjur dan Kecamatan Pacet. Sehingga telah diputuskan bahwa pemenang Pemilukada Kabupaten Cianjur tahun 2011 adalah pasangan Tjetjep Muchtar Soleh – Suranto yang akan menjabat sebagai bupati dan wakil bupati Kabupaten Cianjur untuk periode 2011 hingga 2016.

Berdasarkan dua kali pemilukada yang telah dilaksanakan di Kabupaten Cianjur tahun 2011, ternyata diketahui hanya sekitar 60% saja masyarakat yang berpartisipasi dalam pemilukada. Menurut Kepala Satuan Divisi Pemilihan dan Sosialisasi Kabupaten Cianjur yaitu Saiful Ulum menyatakan bahwa “dari beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS), tingkat partisipasi masyarakat dalam pilkada ini menurun dibandingkan dengan pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres) yang lalu. Partisipasi pemilih pada Pemilukada Cianjur ini diperkirakan hanya 60 persen saja” (KPU Kabupaten Cianjur, 2011).

Dengan diketahui jumlah partisipasi Pemilukada Kabupaten Cianjur tahun 2011 yang diperkirakan hanya 60%, maka dapat diketahui bahwa jumlah golput dalam Pemilukada Kabupaten Cianjur tahun 2011 diperkirakan sekitar 40%. Hal ini tentu saja tergolong adanya penambahan jumlah golput jika dibandingkan dengan angka golput pada Pemilukada Kabupaten Cianjur periode sebelumnya yaitu tahun 2006, dimana jumlah golput mencapai 35%. Selain itu jika dibandingkan dengan angka golput Pilkada Bandung dan Pilkada Kabupaten Karawang tahun lalu yang jumlah golputnya hanya mencapai 25% saja, golput Pemilukada Kabupaten Cianjur tahun 2011 masih terbilang tinggi..

Ulum (2011) menyatakan bahwa terdapat beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan pemilu pada Kabupaten Cianjur tahun 2011, yaitu salah satunya adalah ketidakpercayaan terhadap para calon atau peserta pemilu. Lebih jelasnya lagi Ulum (2011) menyatakan bahwa:

Ketidakpercayaan terhadap pemimpin karena tidak adanya perubahan pembangunan setelah memilih. Masyarakat yang apriori, faktornya banyak, faktor ketidakpercayaan terhadap pemimpin karena tidak ada perubahan setelah memilih, jenuh, orang-orang yang tidak puas dengan penyaluran politik sebelumnya itu bisa mempengaruhi. Selain itu, partisipasi politik masyarakat juga dipengaruhi oleh kebudayaan politik masyarakat atau orientasi politik.

Orientasi politik menurut Almond dan Verba (1990:16) menyatakan bahwa orientasi politik mencakup aspek-aspek sebagai berikut :

- (1) Orientasi kognitif, yaitu pengetahuan tentang dan kepercayaan pada politik, peranan dan segala kewajibannya, serta input, dan outputnya;
- (2) Orientasi afektif, yaitu perasaan terhadap sistem politik, peranannya, para aktor dan penampilannya;
- (3) Orientasi evaluatif, yaitu keputusan dan pendapat tentang obyek-obyek politik yang secara tipikal melibatkan kombinasi standar nilai dan kriteria dengan informasi, dan perasaan.

Dari pendapat Almond dan Verba tersebut dapat diketahui bahwa orientasi politik itu terdiri atas orientasi kognitif yang berhubungan dengan pengetahuan politik, orientasi afektif berhubungan dengan perasaan sistem politik, dan orientasi evaluatif berhubungan dengan keputusan politik. Semua orientasi politik tersebut akan berpengaruh terhadap partisipasi politik masyarakat termasuk partisipasi politik pemilih pemula.

Dalam Studi hasil temuan Tim Litbang Bali Post (2004) dalam jajak pendapat terhadap 150 siswa kelas tiga pada beberapa SMA Negeri di Denpasar

yang telah mengikuti simulasi pemilu menjelang Pemilu 2004 yang lalu, setidaknya bisa memberikan gambaran orientasi politik mereka sebagai pemilih pemula pada Pemilu 2004 yang lalu. Hasilnya adalah orientasi politik kognitif pemilih pemula ternyata tidak mengenal calegnya, baik yang duduk di DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota dimana persentase ketidaktahuannya itu mencapai lebih dari 80%. Sedangkan untuk orientasi politik afektif pemilih pemula ternyata perasaan terhadap sistem politik terutama perasaan terhadap simulasi politik, sebanyak 45,6% menyatakan bahwa simulasi politik membantu mempermudah teknis pencoblosan mereka. Dalam orientasi politik evaluatif pemilih pemula tentang keputusan dan pendapat tentang obyek-obyek politik hasilnya adalah sebanyak 35,8% merasa tidak yakin dan 44% merasa ragu akan apa yang dipilih mereka nanti bisa menyelesaikan persoalan ekonomi, politik dan keamanan.

Berdasarkan kondisi Pemilukada Kabupaten Cianjur Tahun 2011 yang dilaksanakan sebanyak dua kali karena terjadi pemungutan suara ulang di empat kecamatan dengan tingkat partisipasi yang tidak terlalu besar, baik dalam pemungutan suara pertama dan kedua yang tingkat partisipasinya hanya sekitar 60%, serta hasil penelitian Rosmiati (2005) dan studi hasil temuan Tim Litbang Bali Post (2004), maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang pengaruh orientasi politik terhadap partisipasi politik pemilih pemula siswa SLTA pada pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Cianjur tahun 2011.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah, maka penulis mengajukan rumusan masalah pokok penelitian ini, yaitu : "Bagaimanakah orientasi politik mempengaruhi partisipasi politik pemilih pemula siswa SLTA pada pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Cianjur tahun 2011?"

Agar penelitian ini lebih terarah dan terfokus pada pokok permasalahan, maka masalah pokok tersebut penulis jabarkan dalam beberapa sub-sub masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh orientasi kognitif terhadap partisipasi politik pemilih pemula siswa SLTA pada pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kabupaten Cianjur Tahun 2011?
2. Bagaimana pengaruh orientasi afektif terhadap partisipasi politik pemilih pemula siswa SLTA pada pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kabupaten Cianjur Tahun 2011?
3. Bagaimana pengaruh orientasi evaluatif terhadap partisipasi politik pemilih pemula siswa SLTA pada pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kabupaten Cianjur tahun 2011?
4. Bagaimana pengaruh antara orientasi politik terhadap partisipasi politik pemilih pemula siswa SLTA pada pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kabupaten Cianjur tahun 2011?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana hubungan antara orientasi politik mempengaruhi partisipasi politik pemilih pemula siswa SLTA dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Cianjur tahun 2011. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap pengambil kebijakan dalam upaya meningkatkan pengetahuan dan partisipasi politik bagi pemilih pemula siswa SLTA. Tujuan umum tersebut dijabarkan kedalam tujuan secara khusus, yaitu untuk:

1. Mendeskripsikan dan menganalisis secara mendalam bagaimanakah pengaruh orientasi kognitif terhadap partisipasi politik pemilih pemula siswa SLTA pada pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kabupaten Cianjur Tahun 2011.
2. Mendeskripsikan dan menganalisis secara mendalam bagaimanakah pengaruh orientasi afektif terhadap partisipasi politik pemilih pemula siswa SLTA pada pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kabupaten Cianjur Tahun 2011.
3. Mendeskripsikan dan menganalisis secara mendalam bagaimanakah pengaruh orientasi evaluatif terhadap partisipasi politik pemilih pemula siswa SLTA pada pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kabupaten Cianjur Tahun 2011.
4. Mendeskripsikan dan menganalisis secara mendalam bagaimanakah pengaruh orientasi politik terhadap partisipasi politik pemilih pemula siswa

SLTA pada pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kabupaten Cianjur Tahun 2011.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah bersifat teoritik dan praktis. Adapun manfaat-manfaat tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Teoritik

Penelitian ini sebagai salah satu kajian politik dan pemerintahan, terutama berkaitan dengan orientasi politik, budaya politik dan partisipasi politik warga negara.

2. Praktis

- a. Bagi peneliti, penelitian ini berguna sebagai bahan untuk mengetahui pengaruh orientasi politik terhadap partisipasi politik pemilih pemula, sehingga dapat meningkatkan pendidikan politik pemilih pemula melalui Pendidikan Kewarganegaraan di tingkat persekolahan.
- b. Bagi pemilih pemula, penelitian ini untuk meningkatkan pengetahuan politik dan partisipasi politik, sehingga akan tercipta orientasi politik yang baik dan partisipasinya dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah tidak hanya sekedar memilih atau asal ikut dan tidak lebih dari sekedar aksi ritual yang lebih mensyaratkan untuk digugurkan, tetapi diikuti dengan kepeahaman dan berpolitik yang baik.

- c. Bagi Pemerintah, Komisi Pemilihan Umum dan Partai Politik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran agar senantiasa memberikan pendidikan politik dan sosialisasi politik khususnya kepada pemilih pemula, sehingga demokrasi tidak hanya menjadi milik orang dewasa tetapi milik semua pihak.

E. Asumsi

Asumsi-asumsi merupakan sebuah titik tolak pemikiran yang kebenarannya dapat diterima oleh peneliti. Asumsi-asumsi ini diperlukan untuk memperkuat permasalahan, membantu peneliti dalam menjelaskan penetapan objek penelitian, wilayah pengambilan data dan instrumen pengumpulan data. Penelitian ini dilaksanakan atas dasar asumsi bahwa orientasi politik yang terdiri dari orientasi kognitif, afektif dan evaluatif dapat mempengaruhi partisipasi politik pemilih pemula siswa SLTA.

F. Hipotesis

Berdasarkan asumsi-asumsi tersebut, telah ditetapkan hipotesis sebagai berikut.

Hipotesis Mayor

“Orientasi politik berpengaruh terhadap partisipasi politik pemilih pemula siswa SLTA”

Hipotesis Minor

1. Orientasi kognitif berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap partisipasi politik pemilih pemula siswa SLTA dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Cianjur tahun 2011.
2. Orientasi afektif berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap partisipasi politik pemilih pemula siswa SLTA dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Cianjur tahun 2011.
3. Orientasi evaluatif berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap partisipasi politik pemilih pemula siswa SLTA dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Cianjur tahun 2011.
4. Orientasi politik berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap partisipasi politik pemilih pemula siswa SLTA dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Cianjur tahun 2011.

G. Metode Penelitian

Menurut jenis pendekatan, penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, yaitu penelitian yang datanya berupa angka-angka. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis dengan teknik survey. Metode deskriptif-analitis dalam penelitian dioperasionalkan dengan menggunakan statistik inferensial yaitu untuk menganalisis data sampel dan hasilnya digeneralisasikan (diinferensikan) untuk populasi dimana sampel diambil. (Sugiyono, 2001:14).

Metode deskriptif analitis dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik survey, karena mengambil sampel dari suatu populasi dengan menggunakan angket sebagai alat pengukur data pokok. Mc Millan dan Schumacher (2001: 304) menyatakan bahwa “dalam penelitian survey, peneliti menyeleksi suatu sampel dari responden dan menggunakan kuesioner untuk mengumpulkan informasi terhadap variabel yang menjadi perhatian peneliti. Data yang dikumpulkan kemudian digunakan untuk mendeskripsikan karakteristik dari populasi tertentu”. Kerlinger (2002: 267) juga menyatakan bahwa “para peneliti survey mengambil sampel dari banyak responden yang menjawab sejumlah pertanyaan. Mereka mengukur banyak variabel, mengetes banyak hipotesis, dan membuat kesimpulan dari pertanyaan-pertanyaan mengenai perilaku, pengalaman, atau karakteristik dari suatu fenomena”.

Teknik pengumpulan data utama menggunakan teknik kuesioner dengan instrumen angket. Adapun teknik pengumpulan data pendukung yang digunakan adalah observasi lapangan, dan studi dokumentasi sesuai kebutuhan. Hasil kedua teknik tersebut digunakan untuk memperdalam atau memperkuat data yang diperoleh melalui angket.

H. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di SMA Negeri, SMK Negeri dan MA Negeri yang berada di Kabupaten Cianjur dimana siswa kelas XII-nya telah mengikuti pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Cianjur tahun 2011.